

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berisi tentang teori kepustakaan yang menyajikan penelitian untuk mendukung berbagai pemecahan masalah sebagai dasar yang digunakan selanjutnya terhadap analisis yang berhubungan dengan fokus penelitian ini. Adapun mengenai materi yang dipaparkan dalam pemecahan masalah ini yaitu kajian mengenai Administrasi Publik, Implementasi Kebijakan dan Kebijakan Publik serta penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar-dasar teori untuk menguraikan kerangka berpikir serta proposisi.

2.1.1. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

- a. Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat oleh Febrian Marudut (2022)

Dalam Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima studi kasus di kawasan Pasar Senen melalui RPJMD DKI Jakarta 2017-2022 untuk mengembangkan kawasan senen dan Pergub DKI No. 10 Tahun 2015 tentang penataan PKL liar dan resmi dikelola oleh kelurahan Senen dan Kecamatan Senen. Aparat yang turut mendukung penataan dalam hal penertiban yakni SATPOL PP Kelurahan Senen. Penataan PKL di kawasan Pasar Senen diharapkan

dapat mengembangkan kawasan senen sebagai salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jakarta. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran pelaksana (implementor) dalam melakukan penataan PKL di kawasan Pasar Senen. Metode penelitian pada penelitian ini memakai metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana sudah cukup baik dalam melakukan penataan PKL, hal tersebut dilihat dari peran Kelurahan Senen untuk merelokasi PKL liar dan melanjutkan kebijakan penataan PKL resmi PKL sementara dan lokasi binaan yang ada di kawasan Senen.

- b. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya oleh Rizky Wibisono dan Tukiman (2017)

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia sering menjadi sorotan publik, khususnya dalam bidang tata kelola ruang kota. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah dalam menata dan mengatur keberadaan PKL, khususnya di Kota Surabaya. Salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya adalah dengan melakukan penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak tujuannya adalah mengatur atau menertibkan untuk berjualan yang legal, lebih tertib, teratur. Ditambah dengan fasilitas dan kemudahan yang diberikan secara gratis di Sentra Ikan Bulak. Tetapi setelah dilihat dilapangan program penataan PKL tidak berjalan dengan maksimal, itu bisa dilihat dengan kondisi Sentra Ikan Bulak yang sepi ditinggal para pedagang. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran, Kecamatan

Bulak Kota Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya yang dapat dilihat dari tiga faktor yaitu perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan PKL di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor perspektif kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum dipatuhi oleh para pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang.

c. Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Kota Tua Jakarta Oleh Yayat Sujatna (2018)

Kota Tua Jakarta merupakan salah satu destinasi wisata bersejarah yang terletak di Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini sedang melakukan revitalisasi di kawasan tersebut. Ramainya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kota Tua Jakarta berdampak pada banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang atau membuka lapal usaha di kawasan tersebut. Hal ini mendukung Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan dalam penataan dan pemberdayaan ekonomi bagi para pedagang kaki lima juga dapat berjalan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan dan implementasinya serta kendala yang dihadapi dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan Kota Tua Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tua merupakan *successful implementation* dan melibatkan banyak *stakeholders*.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
			Teori yang digunakan	Pendekatan	Metode	Teknis Analisis
1.	Febrian Marudut (2022)	Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat	Donald Van Meter dan Carl Van Horn (dalam Subarsono , 2005)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, wawancara, dan Dokumentasi
2.	Rizky Wibisono dan Tukiman (2017)	Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran kecamatan Bulak Kota Surabaya	Sugiyono (2015)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi
3.	Yayat Sujatna (2018)	Implementasi kebijakan Penataan pedagang kaki lima di Kawasan Kota Tua Jakarta	Van Meter dan Van Horn (dalam Evita dkk, 2013)	Kualitatif	Deskriptif	Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi

Sumber : Data diolah peneliti, 2024

Tabel diatas memperlihatkan bagaimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Perbedaan penelitian terletak pada salah satu variabel yang diteliti, penggunaan teori yang berbeda serta lokus dan fokus penelitian. Dengan demikian penelitian ini merupakan pengembangan bagi peneliti sebelumnya, baik itu dari sisi pengujian terhadap teori dengan objek penelitian yang berbeda maupun pengembangan teori yang baru.

Setelah memahami berbagai perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian peneliti, maka tampak tingkat keaslian penelitian ini, sehingga penelitian terdahulu menjadi daya dukung dan memberikan inspirasi bagi peneliti untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas dan orisinal.

2.1.2. Kajian Administrasi Publik

Kajian Administrasi Publik, khususnya pada kebijakan publik dapat dilihat pada ruang lingkup administrasi publik menurut Nicholas Henry (1995) yaitu:

1. Organisasi publik, yang pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku birokrasi.
2. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen sumber daya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Mulyadi mengatakan dalam bukunya (2016:33) bahwa administrasi publik adalah suatu kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien. Di dalam administrasi publik terdapat kajian kebijakan publik. Adapun kebijakan publik menurut Subarsono dalam bukunya (2009:2) bahwa

kebijakan publik merupakan suatu keputusan para badan pemerintah dalam berbagai bidang.

Ada tiga jenis otoritas yang terlibat dalam pelaksanaan kepentingan negara. Yang pertama adalah otoritas yang menerapkan hukum dalam kasus konkrit. Meski begitu kontroversi selalu muncul saat individu privat atau otoritas publik gagal melihat hak orang lain. Otoritas semacam ini di sebut otoritas judisial. Yang kedua adalah otoritas yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kepentingan negara, dan ini di sebut otoritas eksekutif. Yang terakhir adalah otoritas yang berisi pertimbangan aktivitas ilmiah, teknis dan komersil di dalam pemerintahan.

Di semua negara, aktivitas ini penting dan disebut otoritas administratif. Ketika pemerintah menjadi lebih konfleks, tiga otoritas tersebut, yang semuanya terlibat dalam pelaksanaan kepentingan negara, menjadi semakin berbeda. Sebenarnya ada dua fungsi pemerintah, dan perbedaan ini menghasilkan perbedaan organ dalam pemerintah, meski efeknya kecil. Dua fungsi pemerintahan tersebut disebut disebut sebagai politik dan administrasi. Politik berhubungan dengan kebijakan atau ekspresi kepentingan negara. Administrasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

2.1.3. Kajian Implementasi Publik

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langka yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi

kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan.

Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Implementasi kebijakan tidak akan di mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008:65), mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman

kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan tidak akan dapat dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapat suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

2.1.4. Kajian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik. Berangkat dari hal tersebut istilah kebijakan publik bisa dikatakan tidak lagi menjadi hal yang baru dalam tatanan dunia akademis. Adapun beberapa definisi kebijakan publik yang di sampaikan oleh para ahli dengan pendekatan dan batasan kebijakan publik yang di tawarkan sebagai berikut:

Friedrich (dalam Wahab, 2004:3) mengatakan bahwa :

kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencari tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Chandler dan Plano (dalam Pasolog, 2016:38) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Chandler dan Plano

juga beranggapan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang *continue* oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah.

Kebijakan publik dalam konteks ini di pahami dan didudukan dalam konteks kebijakan sebagai suatu keputusan. Namun keputusan yang berwujud kebijakan publik tidaklah sama dengan keputusan biasa pada umumnya, sesuai dengan definisi diatas kebijakan publik lebih tepatnya merupakan suatu kegiatan atau keputusan yang telah melalui tahap-tahap yang sistematis, sehingga dapat diterapkan menjadi suatu keputusan bersama (kebijakan publik). Kebijakan publik pada hakikatnya di peruntukkan untuk orang banyak (publik), sehingga kebijakan bukan hanya berhenti pada tatanan perumusan sampai dengan terbentuknya suatu keputusan atau kebijakan, melainkan kebijakan harus di sertakan dengan formulasi serta ketentuan-ketentuan penerapan kebijakan tersebut.

2.2. Kerangka Berpikir

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori Merilee S. Grindle.

Selanjutnya adalah penjelasan yang lebih spesifik di kemukakan oleh Merilee S. Grindle (dalam Leo Agustino 2016:142). Terdapat dua faktor yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan antara lain sebagai berikut :

1. Isi Kebijakan (*content of policy*)

Kebijakan adalah suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas arah umum kepada seseorang untuk bergerak. Secara etimologis, kebijakan adalah terjemahan dari kata *policy*. Kebijakan dapat juga berarti sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan dapat berbentuk keputusan yang dipikirkan secara matang dan gati-hati oleh pengambil keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan berulang yang rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya kebijakan (*policy*) adalah suatu tindakan sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) yang diarahkan untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Isi kebijakan (*Content Of Policy*) terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan merespons berbagai masalah publik (*Public Issues*) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, telah diamanatkan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan kemanusiaan”. PKL sebagai bagian dari pedagang sektor informal melakukan usaha tentunya

agar tetap bisa hidup dan kebetulan nasib menjadikan penghidupannya sebagai PKL. Pasal ini merupakan suatu *ius naturale* yang berlaku universal di belahan dunia manapun bahkan diperkuat lagi oleh pasal 28 I ayat (1) yang menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.

Perkembangan PKL dari waktu ke waktu harus diakui bahwa keberadaannya di daerah menimbulkan banyak permasalahan khususnya terkait dengan keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kebersihan di daerah. Di sisi lain keberadaan PKL di daerah juga adalah potensi yang perlu dikembangkan karena secara ekonomi dan sosial memiliki nilai-nilai luhur berupa kerja keras kemandirian, keharmonisan dan kreativitas juga memberikan kontribusi bagi pembangunan di daerah. Melalui peraturan daerah ini, diharapkan dapat tercipta adanya keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kenyamanan bagi warga masyarakat di daerah. Selain itu, keberhasilan dalam penataan dan pembinaan PKL di daerah diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah. Untuk melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle, ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, isi kebijakan terdiri dari enam poin penting yaitu :

a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan

Kepentingan yang dimaksud adalah kepentingan yang dipengaruhi oleh suatu masyarakat, sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target termuat dalam isi suatu kebijakan. Kepentingan terkait dengan berbagai kepentingan yang memiliki pengaruh terhadap suatu implementasi kebijakan. Indikator kepentingan didalam suatu kelompok sasaran kebijakan ini memiliki sebuah argumen bahwa dalam pelaksanaan suatu implementasi kebijakan pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana pengaruh yang dibawa oleh kepentingan-kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakannya.

b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan

Jenis manfaat yang diterima oleh suatu sasaran atau target dalam isi kebijakan merupakan upaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam sebuah kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang termuat atau menghasilkan dampak positif oleh pengimplementasi kebijakan yang akan dilaksanakan.

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Kebijakan mempunyai target yang ingin dicapai serta sejauh mana perubahan yang diinginkan dari adanya sebuah kebijakan. Derajat perubahan yang ingin dicapai menunjukkan seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui adanya sebuah implementasi kebijakan harus memiliki skala yang jelas.

d. Letak pengambilan keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e. pelaksana program

Mengimplementasikan sebuah kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan sebuah kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpaparkan dengan baik pada bagian isi kebijakan.

f. Sumber daya yang dihasilkan

Pelaksanaan sebuah kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Sebuah program yang didukung dengan sumber daya yang memadai akan memudahkan dalam pelaksanaannya sehingga sebuah kebijakan sesuai dengan yang diinginkan.

2. Lingkungan Implementasi (*context of implementation*)

Lingkungan implementasi merupakan latar khusus dimana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan di pengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri. Istilah Implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan oleh berbagai aktor, khususnya pada birokrat yang dimaksud untuk untuk membuat program berjalan. Bernadine R. Wijaya dan Susilo

Supardo (dalam Pasolong, 2016 : 57), mengatakan implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek sejalan dengan yang di ungkapkan Hinggis (dalam Pasolong, 2016 : 57) adalah sebagai berikut:

“Implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sarana strategi artinya dalam mengimplentasikan suatu kebijakan mesti ada instrumen baik SDM, SDA, dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai”.

Berdasarkan pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, individu-individu atau kelompok swasta dengan mengerahkan seluruh sumber-sumber yang ada (dana, SDM, kemampuan organisasional) setelah suatu program ditetapkan, dimana tindakan ini diarahkan untuk mencapai hasil-hasil atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya tercapai. Lingkungan implementasi tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya, jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap, sehingga proses implementasi terancam gagal. Dari aspek tersebut di dapatkan kesimpulan, kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat. Ada 3 poin penting yang ada pada lingkungan kebijakan, yaitu :

- a. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi dari aktor yang terlibat

Kebijakan perlu perhitungan pada kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna

memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, besar kemungkinan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan secara efektif.

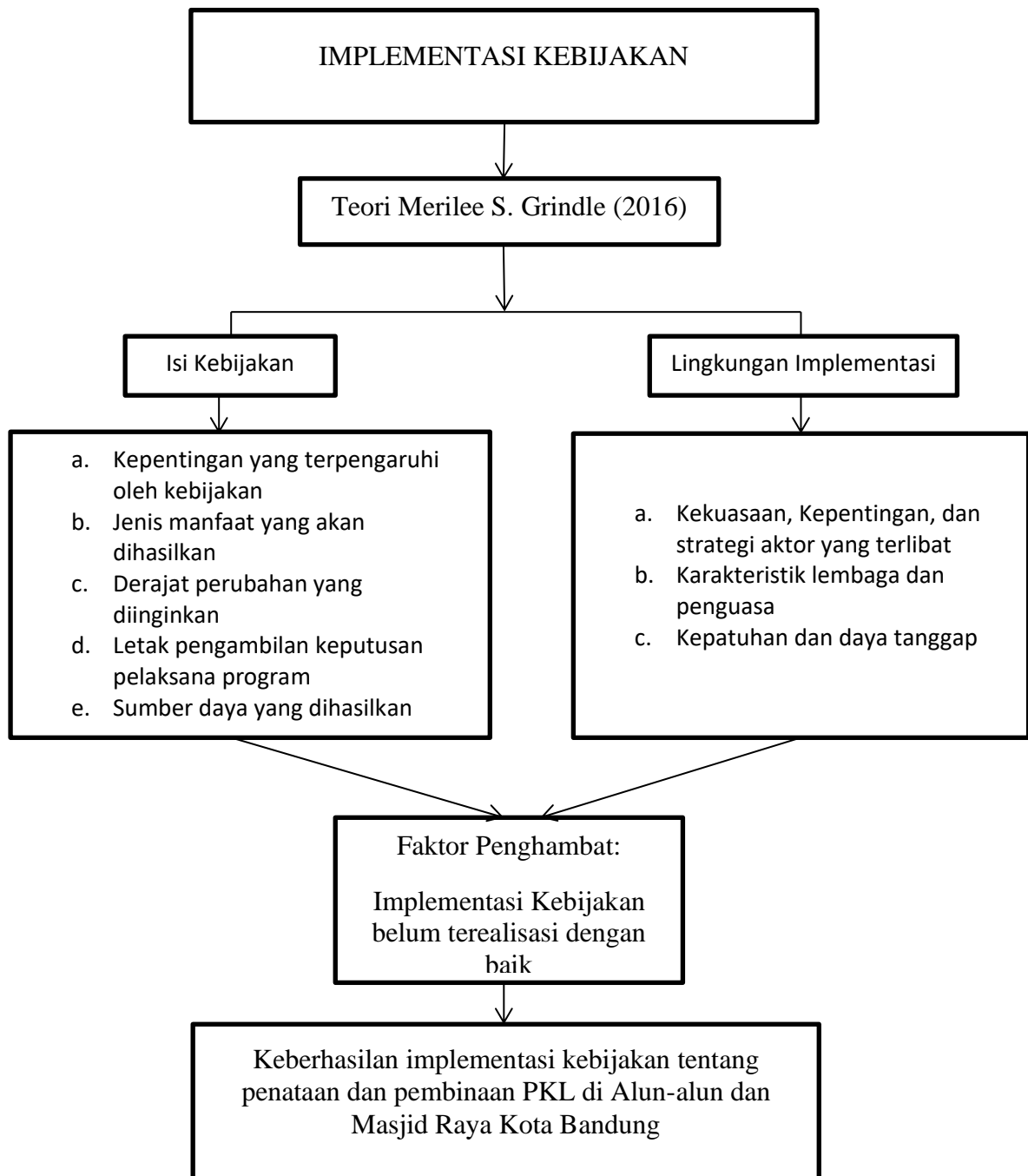
b. Karakteristik lembaga dan penguasa

Lingkungan dimana sebuah kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan yang dijalankan, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi sebuah kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Tingkat kepatuhan dan daya tanggap suatu kelompok sasaran dan respon dari para aktor pelaksana yang juga dirasa menjadi sebuah aspek penting dalam sebuah proses pelaksanaan sebuah kebijakan. Maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi sebuah kebijakan.

Pelaksanaan sebuah kebijakan yang ditentukan oleh isi kebijakan dan lingkungan implementasi yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah sebuah kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi. Seperti yang telah diuraikan diatas, bahwa penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan model Merile S. Grindle yang diukur dari tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

2.3. Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut ini proposisi mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penataan dan Pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung sebagai berikut:

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung belum efektif.
2. Faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan tentang penataan dan pembinaan PKL di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung karena para PKL masih ada yang belum menaati peraturan dengan melihat isi kebijakan dan lingkungan implementasi.